



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA (BMKG)
UNIT KERJA : KEDEPUTIAN BIDANG KLIMATOLOGI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **A. FACHRI RADJAB**
2. Jabatan : **KEPALA PUSAT**
3. NHK : **523423**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.565.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 126 m2/29 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 565.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 85 m2/89 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 665.000.000		
3. Tanah Seluas 160 m2 di KAB / KOTA LOMBOK BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000		
4. Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA LOMBOK BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	36.000.000
1. MOTOR, HONDA BEBEK Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000		
2. MOTOR, VESPA SCOOTER Tahun 1974, HASIL SENDIRI Rp. 11.000.000		
3. MOTOR, YAMAHA RX-KING Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 23.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	34.000.000
D. SURAT BERTAGIH	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	12.146.598
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.647.146.598



III. HUTANG

Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

1.647.146.598

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.